



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025

LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PADANG TAHUN ANGGARAN 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN
KEPULAUAN RIAU KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PADANG TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PENGANTAR | <i>iv</i> |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | <i>vi</i> |
| BAB I | 8 |
| PENDAHULUAN | 8 |
| A. LATAR BELAKANG | 8 |
| B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI | 9 |
| BAB II | 18 |
| PERENCANAAN KINERJA | 18 |
| A. PERENCANAAN STRATEGIS | 18 |
| B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 | 19 |
| C. PETA STRATEGI | 19 |
| D. KONTRAK KINERJA | 20 |
| E. PENGUKURAN KINERJA | 21 |
| F. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA | 21 |
| G. ADENDUM KONTRAK KINERJA | 21 |
| C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 | 22 |
| BAB III | 25 |
| AKUNTABILITAS KERJA | 25 |
| DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA | 25 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 25 |
| B. KINERJA LAINNYA | 37 |
| C. ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO | 48 |
| D. RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2026 | 48 |
| E. REALISASI ANGGARAN | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| LAMPIRAN | <i>Error! Bookmark not defined.</i> |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi | 10 |
| Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai | 10 |
| Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur & Golongan | 12 |
| Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Golongan..... | 13 |
| | |
| Gambar 3. 1 Visi,Misi,Tujuan, dan Sasaran Stategis DJKN 2025-2029 | 19 |
| Gambar 3. 2 Dokumentasi Kegiatan | 38 |
| Gambar 3. 3 Dokumentasi Kegiatan | 40 |
| Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan | 41 |
| Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan | 42 |
| Gambar 3. 6 Dokumentasi Kegiatan | 44 |
| Gambar 3. 7 Dokumentasi Kegiatan | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan..... | 11 |
| Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan | 11 |
| Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan..... | 13 |
| Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan | 14 |
| Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional | 15 |
| Tabel 1. 6 Kontrak Kinerja KPKNL Padang..... | 20 |
| | |
| Tabel 2. 1 Perubahan Rincian Targer Kerja Adendum Perjanjian Nomor: 1A/WKN.03/2025 | 22 |
| | |
| Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padang Tahun 2025..... | 25 |

PENGANTAR

Budaya good governance dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas good governance tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2025 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2025. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem *balance scorecard* (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2025, ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan *full disclosure* pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta

dengan didorong oleh semangat *One Team, One Spirit, One Goal*, KPKNL Padang selalu melakukan *continuous improvement* demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2025 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Padang



Ditandatangani secara elektronik

Ahid Iwanudin

NIP 197102261998031001

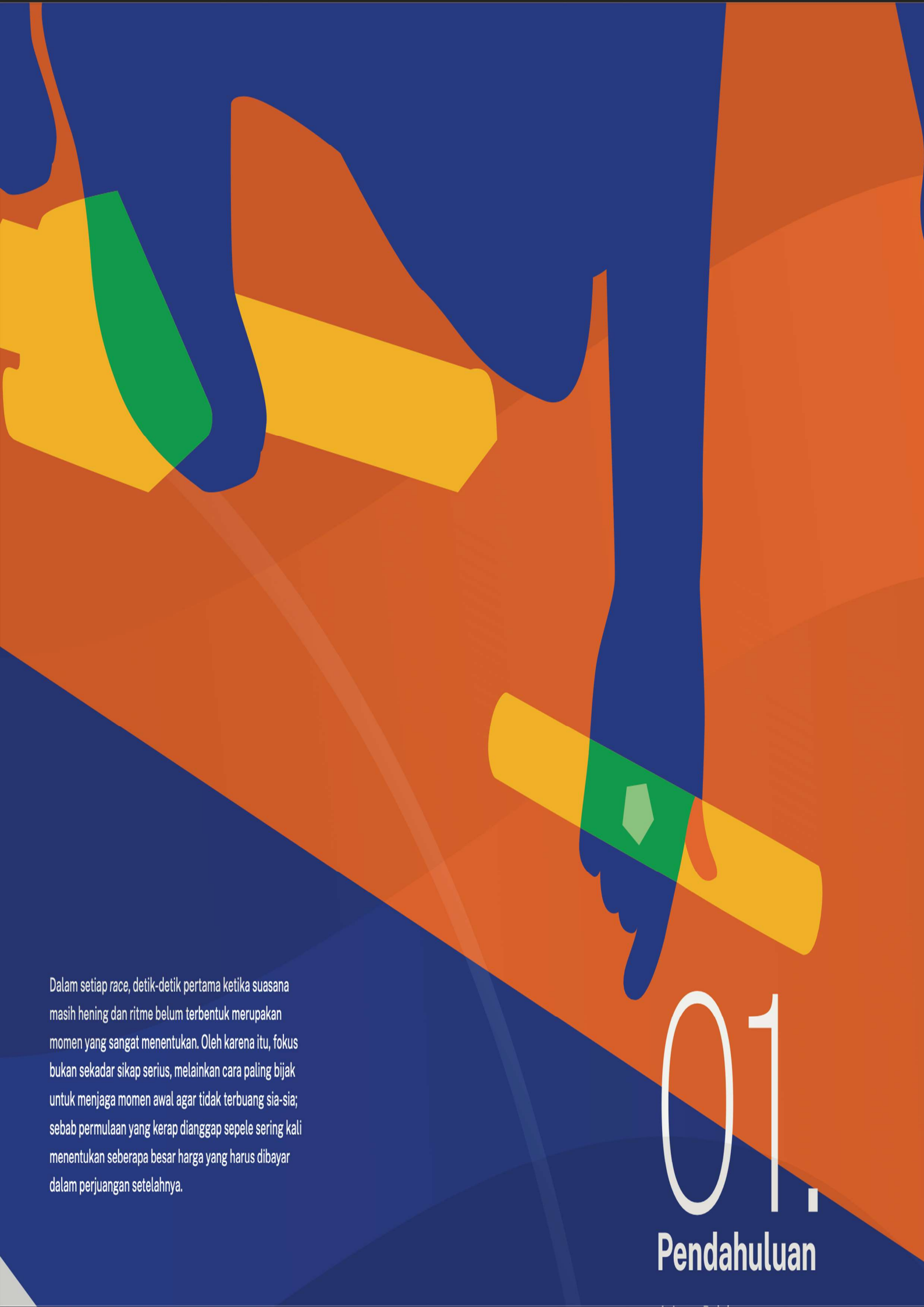


IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di Kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.





Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

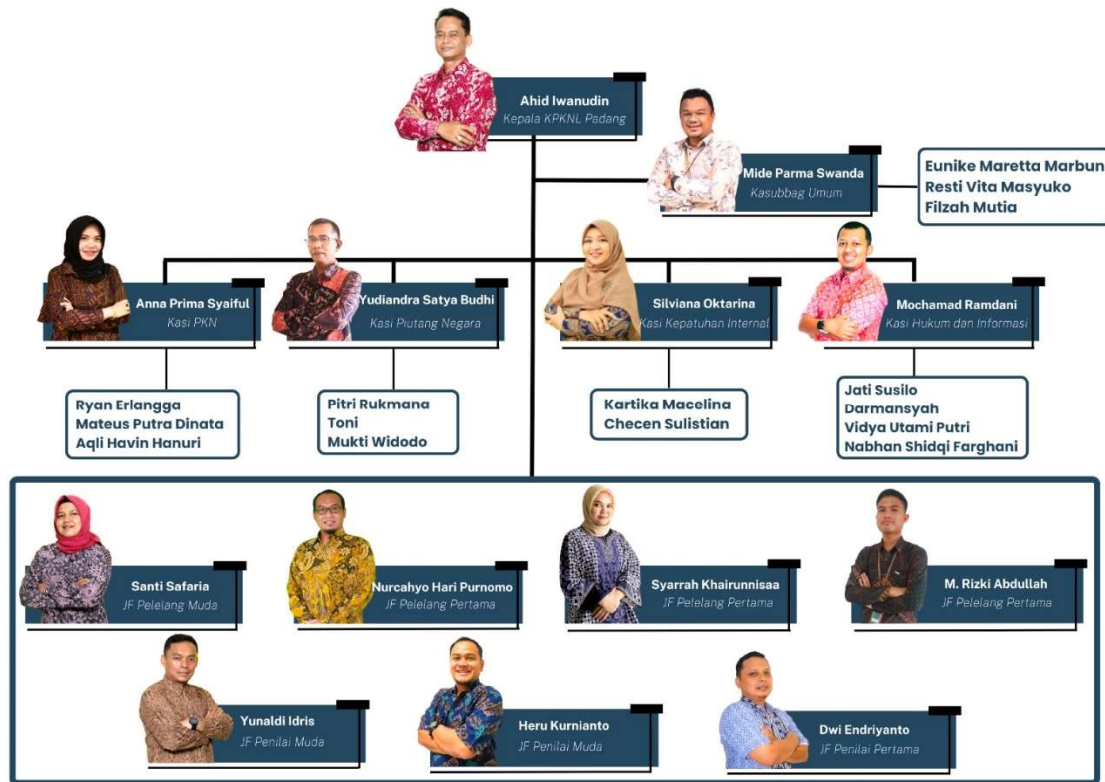
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL

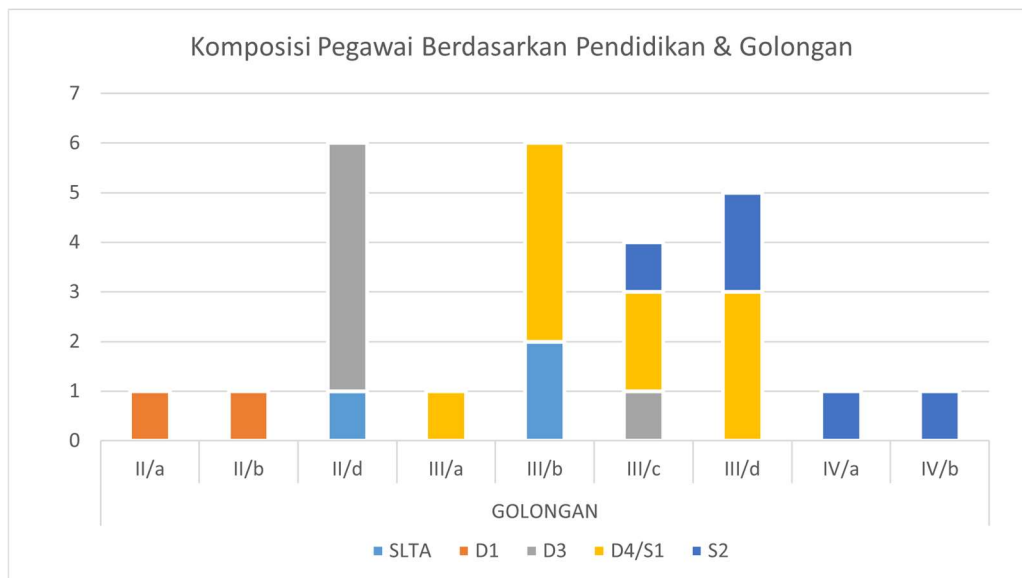
KPKNL Padang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi lima unit eselon IV dan satu unit kelompok jabatan fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
- c. Seksi Piutang Negara
- d. Seksi Hukum dan Informasi
- e. Seksi Kepatuhan Internal
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai)

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai



Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran, pelaksanaan kegiatan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada di KPKNL Padang, berdasarkan Data per-31 Desember 2025 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 26 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah 14 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 2 orang, dengan 1 orang diantaranya menduduki golongan III. Sementara lulusan DIII berjumlah 6 orang dan S2 berjumlah 3 orang, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

| PENDIDIKAN | GOLONGAN | | | | | | | | | | TOTAL (Orang) |
|------------------------|----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|
| | II/a | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | |
| SLTA | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| D1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| D3 | | | 1 | 4 | | | 1 | | | | 6 |
| D4/S1 | | | | | 2 | 4 | 2 | 6 | | | 14 |
| S2 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| Jumlah Pegawai (Orang) | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 26 |

b. Berdasarkan Umur dan Golongan

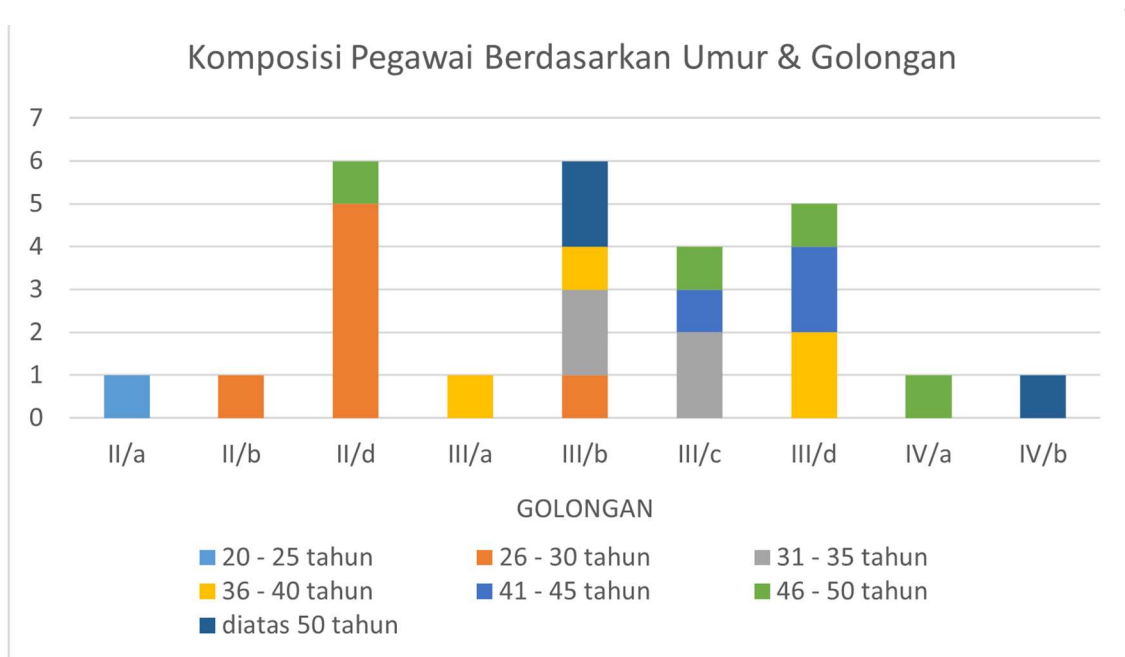
KPKNL Padang pada tahun depan akan seorang pegawai karena pensiun (usia diatas 50 tahun sejumlah 2 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 7 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 6 orang, dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 11 orang yang mendominasi.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur dan Golongan

| UMUR | GOLONGAN | | | | | | | | | TOTAL (Orang) |
|---------------|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|
| | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | |
| 20 - 25 tahun | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 26 - 30 tahun | | 1 | 4 | 1 | | | | | | 6 |
| 31 - 35 tahun | | | | | 3 | 2 | | | | 5 |
| 36 - 40 tahun | | | | | | | 1 | | | 1 |
| 41 - 45 tahun | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | 6 |
| 46 - 50 tahun | | | 1 | | | 1 | 3 | | | 5 |
| > 50 tahun | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Jumlah Pegawai (Orang) | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 26 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Gambar 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur & Golongan



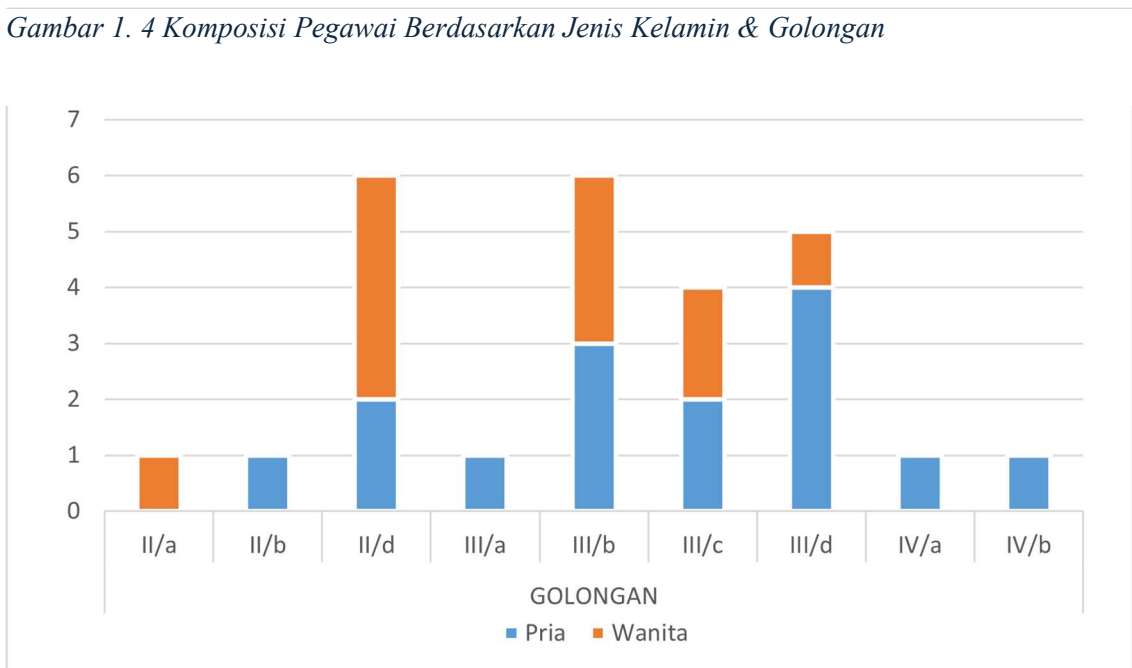
c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Berdasarkan komposisi jenis kelamin dan golongan, dapat diketahui bahwa pegawai KPKNL Padang didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 14 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 12 orang. Rincian komposisi pegawai menurut jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

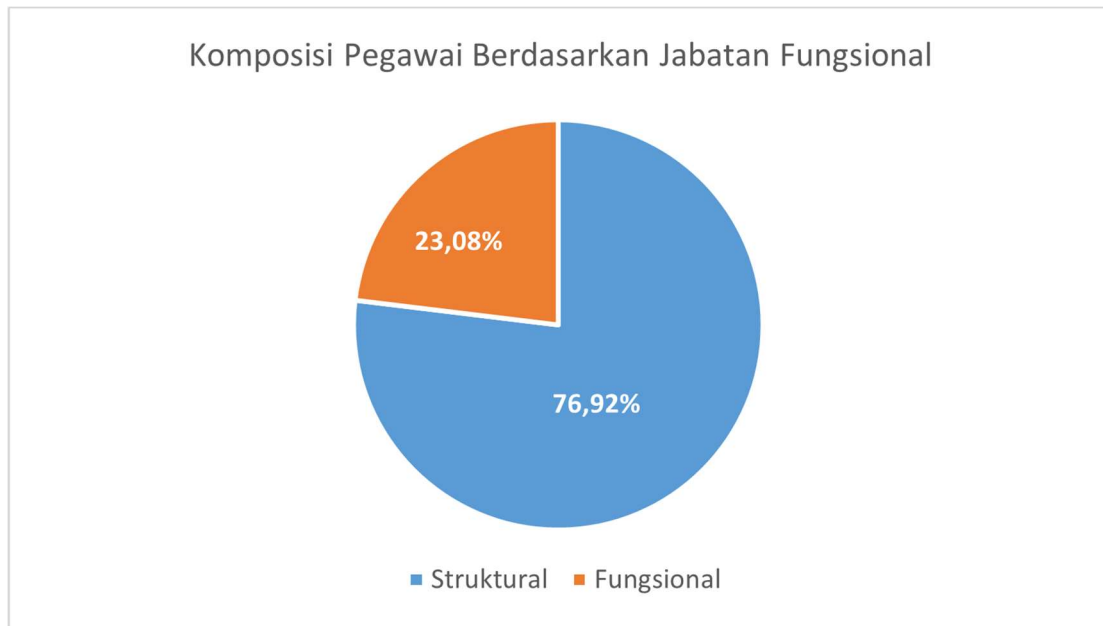
| JENIS KELAMIN | GOLONGAN | | | | | | | | | TOTAL (Orang) |
|------------------------|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------|
| | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | |
| Pria | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| Wanita | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Jumlah Pegawai (Orang) | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 26 |

Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin & Golongan



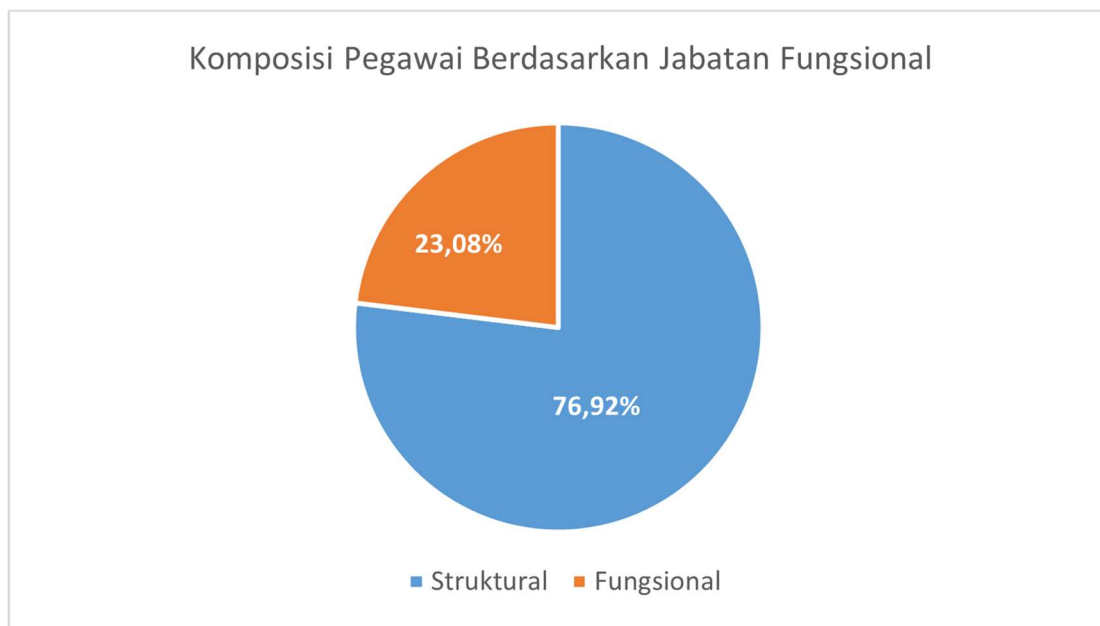
d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Agar dapat menyediakan pelayanan secara maksimal, KPKNL Padang memiliki pegawai yang terdiri dari dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Saat ini, pegawai dengan jabatan struktural berjumlah 20 orang dan pegawai yang memiliki kompetensi fungsional berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi kelompok JF Pelelang dan JF Penilai.




Tabel 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

| JENIS JABATAN | JUMLAH PEGAWAI (Orang) |
|---------------|------------------------|
| Struktural | 20 |
| Fungsional | 6 |
| TOTAL | 26 |



Tabel 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

| UNIT KERJA | TERAMPI L | PERTAM A | MUDA | MADY A | JUMLAH |
|----------------------|--------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Kelompok JF Pelelang | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Kelompok JF Penilai | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Rehnement Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Padang membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Padang tahun 2025 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2018, terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

C. PETA STRATEGI

Gambar 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis DJKN 2025-2029



D. KONTRAK KINERJA

Tabel 1. 6 Kontrak Kinerja KPKNL Padang

| NO. | SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 1a-CP Indeks Integritas | 100 |
| | | 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100% |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |
| | | 2b-CP Persentase realisasi pokok lelang | 100% |
| | | 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 |
| | | 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | 100% |
| | | 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% |
| | | 5c-CP Persentase produktivitas lelang | 80% |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran | 100% |
| | | 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | 100% |
| | | 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|--|----|
| | | Penilaian | | |
| | | 7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | | 80 |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 80 |

E. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

F. PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap triwulannya.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reviu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

G. ADENDUM KONTRAK KINERJA

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Perubahan indikator kinerja utama yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: 1A/WKN.03/2025 adalah sebagai berikut:

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Semula | | Menjadi | |
|-----|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | | Indikator Kinerja | Target | Indikator Kinerja | Target |
| 1. | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang 100 (72.8 M) | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang 100 (Rp79,3 M) |
| 2. | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara 100 (350 JT) | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara 100 (Rp1,08 M) |
| 3. | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara 100 (40) | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara 100 (41.90) |

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Perubahan rincian target kerja atau *trajectory* yang terdapat pada Adendum Perjanjian Nomor: PK-01A/WKN.03/2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perubahan Rincian Targer Kerja Adendum Perjanjian Nomor: 1A/WKN.03/2025

| Sebelum | | | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|---------|------|---------|------|---------------|----------|---|--------|------|---------|------|---------|------|-----------------|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | S.d. Q2 | Q3 | S.d. Q3 | Q4 | Y | | | Q1 | Q2 | S.d. Q2 | Q3 | S.d. Q3 | Q4 | Y |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (72.8 M) | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (79.3 M) |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (350 JT) | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (Rp1,08 M) |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (40) | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% (41.90) |

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

| No. | SS | Kode IKU | Nama IKU | Target |
|-----|---|----------|--|--------|
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel | 1a-CP | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan | 100 |
| | | 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | 100% |
| 2 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan | 2a-CP | Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah | 100% |
| | | 2b-N | Tingkat Efektifitas Pembinaan | 80% |
| 3 | Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif | 3a-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% |
| | | 3b-CP | Persentase realisasi kinerja Lelang | 100% |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | 4a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% |

| No. | SS | Kode IKU | Nama IKU | Target |
|-----|--|----------|--|--------|
| | | 4b-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | 100% |
| | | 4c-N | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Piutang Negara | 100% |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 80% |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 85% |
| 6 | Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif | 6a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 100% |
| | | 6b-N | Indeks kualitas kinerja anggaran | 100 |
| | | 6c-N | Indeks pengelolaan Kearsipan | 80 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP | Indeks efektivitas komunikasi publik | 80 |
| | | 7b-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | 80 |
| 8 | Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks integritas organisasi | 100 |
| | | 8b-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | 83 |
| | | 8c-N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan itjen yang ditindaklanjuti | 95,6% |



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 terhadap 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang maka diperoleh hasil dimana seluruh IKU mencapai target yang ditentukan. Berikut rincian capaian kinerja atas 11 IKU KPKNL Padang tahun 2025:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padang Tahun 2025

| NO. | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % | |
|--------------------------------|---|-------------------|--|-----------|---------|--------|
| STAKEHOLDERS PERSPECTIVE (30%) | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya | 1a-CP | Indeks Integritas | 100 | 120 | 120 |
| | | 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100% | 131,21% | 131,21 |
| CUSTOMER PERSPECTIVE (20%) | | | | | | |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | 100% | 113,52% | 113,52 |
| | | 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 100% | 130,51% | 130,51 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|---|------|---------|--------|
| | | 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | 100% | 125,41% | 125,41 |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | 74 | 117,43 | 158,68 |
| | | 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | 77 | 94,59 | 122,84 |
| PROCESS PERSPECTIVE (25%) | | | | | | |
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien | 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 100% | 101,59% | 101,59 |
| | | 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | 100% | 113,39% | 113,39 |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | 100% | 126,25% | 126,25 |
| | | 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | 70% | 105,94% | 151,34 |
| | | 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | 80% | 117,60% | 146,99 |

| LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%) | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--|-----|--------|----------------|
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 120 | 120 |
| | | 6b-N | Persentase Produktivitas Lelang | 100 | 120 | 120 |
| | | 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | 80% | 98% | 122,50 |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | 7a-CP | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 100 | 114,02 | 114,02 |
| | | 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik | 80 | 115,83 | 144,79 |
| | | | | | | |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | 8a-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 80 | 99,52 | 124,40 |
| NILAI KINERJA ORGANISASI | | | | | | 117,95% |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2025 : Rp2.432,771,000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp2.342,756,580

Jumlah Efisiensi Anggaran Program Tahun 2025 : Rp90,014.420

Pada tahun 2025, KPKNL Padang mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,95%. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 5,02% dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 sebesar 112,93%. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 IKU Kemenkeu-Three tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Three tahun 2025 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Indeks Integritas

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK.

b. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. Pemanfaatan barang milik negara; dan

- c. Pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBPN Piutang Negara (PNBPN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. Bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b. Bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. Biaya permohonan lelang,
- d. Uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e. Penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

a. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;

- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

b. Persentase realisasi pokok lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp89.854.000.000.

c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100%

Pada tahun 2025 KPKNL Padang mendapat target sebesar Rp3.346.200.000 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp4.876.684.995. Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN. Indeks ini diperoleh melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang disusun dan dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan DJKN berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengatur metodologi, instrumen, serta tata cara pengolahan dan pelaporan hasil survei. Komponen yang diukur dalam survei meliputi antara lain persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan layanan, peningkatan standar pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan prima di lingkungan DJKN, khususnya pada unit vertikal seperti KPKNL.

b. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, pemberian konsultasi, pendampingan, maupun penyampaian arahan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal DJKN. Kegiatan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan, regulasi, serta proses bisnis layanan kekayaan negara dan lelang, sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara benar, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain edukasi, aspek komunikasi juga memiliki peran penting dalam memastikan pesan, informasi, dan kebijakan yang disampaikan dapat dipahami secara jelas dan tepat oleh pengguna jasa. Komunikasi yang efektif diharapkan mampu meminimalkan kesalahan prosedur, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi stakeholder terhadap layanan DJKN.

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan ukuran tingkat keberhasilan kegiatan edukasi dan komunikasi yang dilaksanakan, yang dilihat dari sejauh mana peserta atau stakeholder memahami substansi materi yang disampaikan serta mampu mengimplementasikannya dalam praktik. Pengukuran indeks ini mencerminkan kualitas materi, metode penyampaian, keterjangkauan informasi, serta relevansi topik dengan kebutuhan pengguna jasa.

Dengan meningkatnya efektivitas edukasi dan komunikasi, diharapkan terjadi peningkatan kualitas interaksi antara DJKN dengan stakeholder, berkurangnya kesalahan administrasi dan prosedural, serta meningkatnya kelancaran pelaksanaan layanan kekayaan negara dan lelang secara keseluruhan.

Sasaran Strategis 4: Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

a. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertifikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat (termasuk yang berstatus Bersertifikat Lainnya), dengan output Sertifikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

b. Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimbingan teknis, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Sasaran Strategis 5: Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas (SPPNL)
2. BKPN Penarikan (SPPNS)
3. BKPN Dikembalikan (SKPBN), dan
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat) Target 100% (160 BKPN).

b. Tingkat kualitas layanan penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesainya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada.

Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.
3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a. Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b. Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;
 - c. Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e. objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan.Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)

5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/atau bantuan teknis penilaian.

c. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II, dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi presentase produktivitas lelang mencapai 116,25% dari target yang ditetapkan sebesar 89%. Sejak tahun 2025 jumlah frekuensi lelang tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah risalah lelang melainkan dihitung berdasarkan jumlah lot barang yang dilelang.

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

a. Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

b. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

c. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Dengan Indikator Kinerja Utama:

Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a. Indeks penanganan permasalahan hukum

b. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi public dari pengguna layanan
2. Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik
3. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Capaian pada TW 1 2025 mencapai 86,96 poin dari target 80 poin, sedangkan untuk TW 2 s.d. TW 4 2025 capaian IKU sebesar 100 poin.

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

a. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai Kementerian Keuangan.

Dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, maka diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

B. KINERJA LAINNYA

Selain dari 18 (delapan belas) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Public Campaign KPKNL Padang edisi Bincang Lelang

Gambar 3. 2 Dokumentasi Kegiatan



KPKNL Padang menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan Public Campaign dengan memanfaatkan media digital melalui siaran langsung Instagram (Live IG) KPKNL Padang dalam program **Bincang Lelang**. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya yang umumnya dilakukan secara luring dengan tatap muka bersama masyarakat dan pemangku kepentingan, kali ini sosialisasi dilakukan secara daring untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Edisi Bincang Lelang yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Februari, mengangkat tema *Serba-serbi Pelaksanaan Lelang Kendaraan Bermotor*.

Program Bincang Lelang dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pertanyaan dari masyarakat dan calon peserta lelang yang disampaikan melalui WhatsApp Layanan Informasi KPKNL Padang, khususnya terkait pelaksanaan lelang Barang Milik Daerah (BMD) melalui laman lelang.go.id dan Aplikasi Lelang V2. Oleh karena itu, kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana penyampaian informasi yang resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, para pemangku kepentingan, serta internal DJKN.

Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi layanan publik yang cepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap praktik penipuan akibat maraknya informasi lelang palsu, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan manfaat lelang dalam pengelolaan aset negara dan daerah, serta memperkuat hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan guna memudahkan klarifikasi atas informasi yang beredar di masyarakat.

Kegiatan dikemas dalam format talkshow/podcast yang dipandu oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Padang, Mochamad Ramdani, dengan menghadirkan narasumber Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama, Nurcahyo Hari Purnomo. Selama siaran yang berlangsung pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB, narasumber memaparkan tahapan dan ketentuan bagi calon peserta lelang, dengan penekanan pada tata cara penggunaan Aplikasi Lelang V2. Interaksi dengan masyarakat berlangsung secara aktif melalui sesi tanya jawab pada kolom komentar siaran langsung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti lelang BMD dapat meningkat sehingga berkontribusi pada optimalisasi pendapatan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko penipuan lelang yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Audiensi FEBA Sumbar dengan Gubernur Sumatera Barat

Gambar 3. 3 Dokumentasi Kegiatan



Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Barat sekaligus Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat bersama Forum Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Barat (FEBA) melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. FEBA, yang dibentuk pada Januari 2024, merupakan forum inisiatif Kanwil DJPb Sumbar yang beranggotakan pimpinan instansi vertikal di Kota Padang yang menjadi mitra Komisi XI DPR. Forum ini terdiri dari Kementerian Keuangan (DJPb, DJP, DJBC, DJKN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pusat Statistik.

Dalam pertemuan pada Kamis (06/03), Tim FEBA dan Gubernur membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, pemanfaatan potensi ekonomi, serta peningkatan kemandirian fiskal. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kebutuhan pengembangan pelabuhan besar guna mendukung ekspor komoditas unggulan Sumbar. Sedangkan dari sisi Ditjen Kekayaan Negara, Kepala KPKNL Padang Ahid Iwanudin menyampaikan potensi besar atas pemanfaatan aset yang dimiliki Pemprov Sumbar dan Gubernur pun mendukung usulan tersebut dengan merencanakan sertifikasi aset Tanah dan Bangunan dilingkungannya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk bersinergi dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing ekonomi Sumatera Barat di tingkat nasional maupun internasional. Sebagaimana yang telah berjalan,

pertemuan FEBA akan terus diagendakan secara rutin minimal setiap tiga bulan sekali, agar dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah.

Pelaksanaan Sosialisasi Internal Antikorupsi dan Pembinaan Mental Rohani Pegawaidi Lingkungan KPKNL Padang

Gambar 3. 4 Dokumentasi Kegiatan



Kamis (20/03) bertempat di Aula KPKNL Padang Para Pejabat, Pegawai serta PPNPN mendapatkan Sosialisasi Antikorupsi Dalam Rangka Penguatan Integritas Pegawaidi Lingkungan KPKNL Padang yang dilakukan oleh Kepala KPKNL Padang serta dilanjutkan kegiatan pembinaan mental bidang Rohani bersama Ustad Zuhdi Ibadurrahman, BA, MA, CCLS, CWC.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan KPKNL Padang dapat menerapkan budaya antikorupsi sesuai ketentuan yang berlaku, memiliki mental dengan integritas tinggi dan selalu menjaga netralitas dalam kebijakan bermedia sosial. Acara juga dilanjutkan pembinaan mental Rohani sekaligus kegiatan buka puasa bersama lingkup Pegawai dan keluarga KPKNL Padang.

Kegiatan tersebut didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan serta mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu serta mengimplementasikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ngobrol Pintar (Ngopi) With KPKNL Padang

Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan





Padang (23/08) – Acara Komunitas Uang Kita (Komunita) Ngopi With KPKNL Padang berlangsung sukses dan meriah dengan di hadiri peserta dari kalangan mahasiswa. Para peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi materi hingga simulasi lelang. Materi yang di sampaikan pemateri memberikan wawasan baru mengenai pentingnya pengelolaan kekayaan negara, peran lelang dalam transparansi public, serta bagaimana mahasiswa dapat turut serta menjadi agen perubahan dalam menjaga asset negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana silaturahmi antara civitas akademika dengan KPKNL Padang serta Komunitas lokal yang peduli terhadap literasi keuangan.

Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan satu arah, melainkan juga membuka ruang diskusi dua arah antara pemateri dengan mahasiswa. Banyak pertanyaan kritis yang di ajukan terkait isu-isu aktual dalam pegelolaan asset negara, seperti tantangan penilaian BMN, transparansi lelang digital, hingga strategi penyelesaian piutang negara. Hal ini menunjukkan bahwa mahasissswa kepedulian yang besar terhadap keberlangsungan tata Kelola keuangan.

Sinergi antara Komunita Regional Padang dengan KPKNL Padang juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Kedua pihak berhasil menyatukan visi dalam menyampaikan edukasi mengenai keuangan negara dengan cara kreatif, sehingga pesan yang ingin di sampaikan lebih mudah di terima oleh peserta. Banyak peserta yang mengaku baru memahami secara langsung bagaimana proses lelang berjalan dan bagaimana aset negara dikelola secara profesional. Interaksi yang terjalin dalam sesi tanya jawab dan simulasi lelang menunjukkan antusiasme tinggi dari mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh tentang peran DJKN dan KPKNL dalam menjaga keuangan negara.

Salah satu kegiatan yang paling dinantikan adalah simulasi lelang. Dalam simulasi ini, peserta berperan sebagai peserta lelang sungguhan yang saling bersaing untuk mendapatkan barang yang dilelang. Kegiatan ini tidak hanya seru, tetapi juga memberikan

pemahaman yang mendalam tentang mekanisme lelang dan pentingnya penilaian aset yang objektif. Melalui acara ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga dan mengembangkan aset-aset negara. Dengan pemahaman yang baik tentang pengelolaan aset negara, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan negara, baik saat mereka sudah bekerja maupun ketika menjadi pemimpin di masa depan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana yang inspiratif, edukatif, sekaligus menyenangkan. Peserta pulang tidak hanya membawa ilmu baru, tetapi juga semangat untuk menjadi bagian dari generasi yang peduli dan berkontribusi nyata dalam menjaga aset negara demi masa depan bangsa.

KPKNL Padang hadir dalam Sumbar Expo 2025

Gambar 3. 6 Dokumentasi Kegiatan



Dalam rangka mendukung penguatan kinerja ekspor daerah di Provinsi Sumatera Barat, KPKNL Padang turut berpartisipasi dalam kegiatan **SUMBAR EXPO 2025** yang mengusung tema *Gerak Cepat Ekspor Sumbar*. Pada kegiatan tersebut, KPKNL Padang bersama Kemenkeu Satu Sumbar membuka Layanan **Sarumpun** yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2025 bertempat di Hotel Truntum Padang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan ajang strategis yang menghadirkan rangkaian agenda inspiratif, kolaboratif, dan edukatif bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat Sumatera Barat. SUMBAR EXPO 2025 menjadi wadah bagi petani, pelaku UMKM, pelaku usaha, dan eksportir untuk meningkatkan kapasitas serta mengoptimalkan potensi produk daerah dalam rangka memperluas akses pasar hingga ke tingkat global. Hal ini sejalan dengan peran Kemenkeu Satu Sumbar dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dan berorientasi ekspor (*go international*).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, serta Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sumbar. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyampaikan harapan agar UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam kegiatan ekspor, mengingat Indonesia telah menjalin perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) dengan sekitar 25 negara yang membuka peluang luas bagi Sumatera Barat untuk meningkatkan ekspor produk unggulannya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung program pemberdayaan ekspor sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah, khususnya melalui pembukaan akses ekspor yang berkelanjutan bagi komoditas unggulan Sumatera Barat.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan KPKNL Padang Tahun 2025

Gambar 3. 7 Dokumentasi Kegiatan



Sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif serta dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau berkolaborasi dengan KPKNL Padang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik tahun 2025 pada hari Rabu (8/10) yang dilaksanakan secara hybrid, yakni di Aula Kanwil DJKN RSK Jl. Pepaya No.77, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru untuk peserta luar jaringan (luring) dan melalui aplikasi Ms Team untuk peserta dalam jaringan (daring).

Kepala Kanwil DJKN RSK, Wahyu Prihantoro memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan tujuan pelaksanaan FKP, peran Kemenkeu Satu khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini pada unit vertikal yakni Kanwil DJKN RSK dan KPKNL Padang di tengah masyarakat, tugas dan fungsi DJKN, tantangan dalam pekerjaan, transparansi dan integritas serta keterlibatan *stakeholders* sebagai pengawas dalam pekerjaan kami sehari-hari. Acara dilanjutkan pemberian *Keynote Speech* oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, Bambang Pratama. Beliau menyampaikan materi pelayanan publik serta menjelaskan sejarah pelayanan publik dari zaman kerajaan sampai saat ini, bagaimana memberikan pelayanan dengan efisiensi yang ada dengan melakukan reformasi birokrasi dan transformasi pola pikir dari dilayani menjadi melayani. Beliau menyoroti pengelolaan informasi yaitu apakah bisa diakses melalui tatap muka atau digitalisasi. Salah satu yang harus dikedepankan DJKN adalah pelayanan konsultasi karena masih banyak hal yang harus digali. Penyuluhan kepada masyarakat bukan hanya berbasis anggaran. Penyuluhan kepada masyarakat bisa diberikan melalui media sosial. Jika sudah ada pelaksana pelayanan, pengelolaan informasi, pengelolaan konsultasi, dan penyuluhan maka pengaduan akan sedikit karena biasanya pengaduan berawal dari tidak teraksesnya informasi, tidak adanya konsultasi, dan tidak adanya penyuluhan. Bambang Pratama mendorong Kanwil DJKN RSK untuk bergabung di MPP serta mengingatkan kepada peserta yang hadir bahwa fokus pemberi pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Setelah sambutan dan pemberian *Keynote Speech*, acara dilanjutkan dengan paparan pengenalan tusi masing-masing Bidang pada Kanwil DJKN dan penjelasan tusi KPKNL yang disampaikan Kepala KPKNL Padang, Ahid Iwanudin. Diawal penjelasan Beliau, KPKNL Padang berkomitmen tidak menerima imbalan apapun atas pelayanan yang diberikan kepada semua *stakeholder*. Ahid Iwanudin menjelaskan KPKNL Padang melayani 11 wilayah kota/kabupaten dengan tugas memberikan pelayanan PKN, penilaian, PN, dan lelang. KPKNL Padang melayani 830 satuan kerja dan mengelola aset dengan nilai 87triliun rupiah. Sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas, ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan khususnya terkait aset. *Mindset* bahwa aset adalah *cost center* perlu diubah menjadi *revenue center*. Di siklus pengelolaan BMN, penyebab kegagalan adalah sejak membuat rencana kebutuhan. Peran DJKN dalam siklus pengelolaan BMN adalah saat penggunaan dan pemanfaatan. Pada prinsipnya, BMN dan Barang Milik Daerah dibeli untuk menyelenggarakan tusi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aset-aset *idle* yang tidak digunakan untuk tusi dapat dimanfaatkan seperti sewa kantin, sewa ATM, sewa untuk Tower seluler, dan sebagainya. Penatausahaan ada tiga hal yang penting mengamankan BMN secara administratif, fisik, dan hukum. Diakhir paparan beliau, Ahid Iwanudin mengingatkan kepada peserta yang hadir agar perhatian terjawab penipuan lelang dengan berbagai modus seperti menawarkan dengan harga tidak wajar, mengaku sebagai pegawai DJKN dan menggunakan akun sosial palsu, menjanjikan menang lelang, mendesak agar segera transfer, dan aktif menghubungi korban. Lelang sudah melakukan transformasi yaitu dilakukan secara digital melalui lelang.go.id yang bisa diakses juga dari HP.

Diakhir sesi, untuk mendapatkan *feedback* atas pelayanan yang telah diberikan oleh Kanwil DJKN RSK dan KPKNL Padang kepada *stakeholder*, dilakukan sesi diskusi dan/atau masukan/saran yang mana untuk upaya perbaikan kedepan atas layanan yang akan diberikan

C. ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2025 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2025. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan reuiu capaian kinerja

Dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2025 adalah 117,95. Namun terdapat satu buah IKU yang capaiannya kuning yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatalan lelang karena berkas tidak memenuhi syarat, adanya permintaan pembatalan lelang, dan adanya ancaman fisik terhadap pelaksanaan lelang.

D. RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2026

Memasuki tahun 2025 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2026:

1. Melaksanakan monitoring kewajiban pegawai dalam pelaporan LHKPN dan LHKASN.
2. Melaksanakan penggalian potensi lelang.
3. Melaksanakan rekonsiliasi data pengurusan piutang negara dengan pihak Penyerah Piutang.
4. Melaksanakan sosialisasi PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Lelang serta pengenalan Aplikasi Lelang Versi 2.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak legal perbankan terkait gugatan atas pelaksanaan lelang.
6. Melaksanakan edukasi kepada satuan kerja (satker) bersama Seksi PKN terkait usulan nilai dalam kaitannya dengan pengelolaan BMN.
7. Melaksanakan rapat persiapan kegiatan Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN).
8. Melaksanakan peer review untuk menghasilkan nilai yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran secara triwulanan periode Januari–Maret 2025.
10. Melaksanakan pemanggilan debitur serta penerbitan Surat Paksa.
11. Memastikan seluruh penyelesaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau lebih cepat dari batas waktu SOP.
12. Melaksanakan sosialisasi Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

13. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi kepada seluruh seksi dan kelompok jabatan fungsional untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun.

E. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang

Pada tahun 2025, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp2.432.771.000. Dan hingga akhir 2025, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp2.342.756.580 atau total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 96,30%.

| KODE | RINCIAN OUTPUT | PAGU AKHIR | REALISASI ANGGARAN |
|--|---|-------------|--------------------|
| CD PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA DAN RISIKO | | | |
| 4798.AAH.00 1 | Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 76,436,000 | 74,440,848 |
| 4798. AAH.002 | Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 126,090,000 | 123,849,503 |
| 4798.ABA.00 2 | Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 32,944,000 | 25,645,050 |
| 4798. BAH.001 | Risalah Lelang | 32,505,000 | 28,420,080 |
| 4798. FAE.004 | Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara | 3,709,000 | 2,460,000 |
| 4798. FAE.005 | Rekomendasi Hasil Penilaian | 58,452,000 | 48,020,003 |
| 4798. FAE.007 | Penggalian Potensi Lelang | 21,062,000 | 19,871,406 |
| 4798. FAK.001 | Aset BUN yang Dikelola | 109,264,000 | 100,214,246 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 4798. UAE.201 | Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN) | 30,622,000 | 20,049,356 |
| WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | |
| 4700.EBA.96 9 | Layanan Bantuan Hukum | 97,864,000 | 97,806,209 |
| 4701.EBA.00 2 | Kerumahtanggaan | 59,608,000 | 55,974,244 |
| 4701. EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1,682,503,000 | 1,649,475,122 |
| 4701. EBB.001 | Peralatan Fasilitas Perkantoran | 56,162,000 | 54,671,423 |
| 4701. EBB.003 | Kendaraan Bermotor | 28,000,000 | 26,100,000 |
| 4702. BMB.001 | Pembinaan/Edukasi Publik | 4,539,000 | 4,248,085 |
| 4702. BMB.002 | Kehumasan | 6,220,000 | 6,072,500 |
| 4702. BMB.003 | Pameran/Eksibisi | 3,085,000 | 2,787,505 |
| 4704. EBD.001 | Rekomendasi Kepatuhan Internal | 3,706,000 | 2,651,000 |


**DATA CAPAIAN RINCIAN OUTPUT KPKNL PADANG
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

| KOMPONEN | TARGET DALAM DIPA | SATUAN | REALISASI | |
|---|-------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Subbagian Umum | | | | |
| Kerumahtanggaan | 12 | Layanan | 12 | 100.00% |
| Layanan Perkantoran | 12 | Layanan | 12 | 100.00% |
| Peralatan Fasilitas Perkantoran | 5 | Unit | 5 | 100.00% |
| Kendaraan Bermotor | 1 | Unit | 1 | 100.00% |
| Gedung/Bangunan | 193,5 | m2 | 0 | 0.00% |
| Seksi Hukum dan Informasi | | | | |
| Layanan Bantuan Hukum | 25 | Perkara | 56 | 224.00% |
| Pembinaan/Edukasi Publik | 150 | Orang | 378 | 252.00% |
| Kehumasan | 10 | Kegiatan | 41 | 190.00% |
| Pameran/Eksibisi | 1 | Kegiatan | 1 | 100.00% |
| Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara | | | | |
| Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara | 30 | Orang | 158 | 475.00% |
| Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 150 | Surat Keputusan | 365 | 243.33% |
| Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 428 | Rekomendasi | 428 | 100.00%% |
| Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara | 1 | Rekomendasi | 1 | 100.00% |
| Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan | 386 | Rekomendasi | 386 | 100.00%% |
| Aset BUN yang Dikelola | 23 | Aset | 23 | 100.00% |
| Seksi Kepatuhan Internal | | | | |
| Rekomendasi Kepatuhan Internal | 5 | Dokumen | 7 | 140.00% |
| Seksi Piutang Negara | | | | |
| Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara | 25 | Orang | 25 | 100.00% |
| Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 50 | Surat Keputusan | 50 | 100.00% |
| Jabatan Fungsional Penilai | | | | |
| Rekomendasi Hasil Penilaian | 2 | Rekomendasi | 2 | 100.00% |

| Jabatan Fungsional Pelelang | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------|---------|
| Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang | 12 | Orang | 35 | 291,66% |
| Risalah Lelang | 400 | Dokumen | 1.020 | 255.00% |
| Penggalian Potensi Lelang | 2 | Rekomendasi | 2 | 100.00% |

**PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO KPKNL PADANG
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

| URAIAN | PAGU AKHIR (Rp) | REALISASI s.d. TRIWULAN IV (Rp) | % |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pagu Bruto | 2.432,771,000 | 2.342,756,580 | 96,30%. |
| Faktor Pengurang | | | |
| Belanja Pegawai | - | - | |
| <i>Self Blocking</i> | | | |
| Hasil Efisiensi | | 90,014.420 | |
| Dana Khusus | - | - | |
| Penyerapan Anggaran Neto | 2.432,771,000 | 2.342,756,580 | 96,30%. |
| TRAJECTORY PENYERAPAN ANGGARAN NETO TRIWULAN IV | | | 90% |
| CAPAIAN INDIKATOR PENYERAPAN ANGGARAN NETO TRIWULAN IV | | | 100% |



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkul kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV – PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2025 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2025 yang disusun untuk memenuhi asas good governance serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervise atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani di tahun mendatang. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2025, hambatan eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada stakeholder terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap feedback dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas good governance dan bebas KKN.



Lampiran

Lampiran 1

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL PADANG
Periode s.d Triwulan IV 2025

| Kode | IKU | Polarisasi | V/C | Target | Realisasi | Bobot IKU | Bobot Tertimbang IKU | Indeks Capaian IKU | Indeks Max. 120 | Nilai Sasaran Strategis | Nilai Perspective |
|--|--|------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | s.d Triwulan IV | s.d Triwulan IV | | | | | | |
| Stakeholder Perspective (30%) | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya | - | | | | | | | | 111,53 | |
| 1a-CP | Indeks Integritas | Max | P/L | 100,00 | 105,29 | 19,00% | 57,58% | 105,29 | 105,29 | 60,62 | 111,53 |
| 1b-CP | Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang | Max | P/M | 100,00% | 131,21% | 14,00% | 42,42% | 131,21 | 120,00 | 50,91 | |
| Customer Perspective (20%) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal | - | | | | | | | | 117,63 | |
| 2a-CP | Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara | Max | P/L | 100,00% | 113,52% | 19,00% | 36,54% | 113,52 | 113,52 | 41,48 | |
| 2b-CP | Persentase realisasi pokok lelang | Max | P/L | 100,00% | 130,51% | 19,00% | 36,54% | 130,51 | 120,00 | 43,85 | |
| 2c-CP | Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara | Max | P/M | 100,00% | 125,41% | 14,00% | 26,92% | 125,41 | 120,00 | 32,31 | 118,82 |
| 3 | Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa | - | | | | | | | | 120,00 | |
| 3b-N | Indeks kepuasan pengguna layanan | Max | P/M | 77,00 | 94,59 | 14,00% | 50,00% | 122,84 | 120,00 | 60,00 | |
| 3a-CP | Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi | Max | P/M | 74,00 | 117,43 | 14,00% | 50,00% | 158,68 | 120,00 | 60,00 | |
| Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penerapan tata kelola aset yang efektif | - | | | | | | | | 107,49 | |
| 4a-CP | Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan | Max | P/M | 100,00% | 101,59% | 14,00% | 50,00% | 101,59 | 101,59 | 50,79 | |
| 4b-CP | Persentase evaluasi kinerja BMN | Max | P/M | 100,00% | 113,39% | 14,00% | 50,00% | 113,39 | 113,39 | 56,69 | |
| 5 | Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif | - | | | | | | | | 120,00 | 113,74 |
| 5a-CP | Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara | Max | P/M | 100% | 126,25% | 14,00% | 33,33% | 126,25 | 120,00 | 40,00 | |
| 5b-CP | Tingkat kualitas layanan penilaian | Max | P/M | 70% | 105,94% | 14,00% | 33,33% | 151,34 | 120,00 | 40,00 | |
| 5c-CP | Persentase produktivitas lelang | Max | P/M | 80,00% | 117,60% | 14,00% | 33,33% | 146,99 | 120,00 | 40,00 | |
| Learning and Growth Perspective (25%) | | | | | | | | | | | |
| 6 | Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif | - | | | | | | | | 120,00 | |
| 6a-CP | Indeks kualitas kinerja anggaran | Max | P/M | 100,00 | 120,00 | 14,00% | 33,33% | 120,00 | 120,00 | 40,00 | |
| 6b-N | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Max | P/M | 100,00 | 120,00 | 14,00% | 33,33% | 120,00 | 120,00 | 40,00 | |
| 6c-N | Persentase pengembangan kompetensi pegawai | Max | P/M | 80,00% | 98,00% | 14,00% | 33,33% | 122,50 | 120,00 | 40,00 | |
| 7 | Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif | - | | | | | | | | 117,01 | 119,00 |
| 7a-CP | Indeks penanganan permasalahan hukum | Max | P/M | 100,00 | 114,02 | 14,00% | 50,00% | 114,02 | 114,02 | 57,01 | |
| 7b-N | Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) | Max | P/M | 80,00 | 115,83 | 14,00% | 50,00% | 144,79 | 120,00 | 60,00 | |
| 8 | Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif | - | | | | | | | | 120,00 | |
| 8a-N | Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko | Max | P/M | 80,00 | 99,52 | 14,00% | 100,00% | 124,40 | 120,00 | 120,00 | |
| NKO | | | | | | | | | | | 115,41 |

Lampiran 2

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 537848 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

Hal 1 dari 11

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| JUMLAH SELURUHNYA | 2,432,771,000 | 0 | 2,086,087,265 | 256,669,315 | 2,342,756,580 | 96.30 % | 90,014,420 |
| CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | 491,084,000 | 0 | 358,970,695 | 83,999,797 | 442,970,492 | 90.20 % | 48,113,508 |
| CD.4798 Pengelolaan Aset | 491,084,000 | 0 | 358,970,695 | 83,999,797 | 442,970,492 | 90.20 % | 48,113,508 |
| AAH Peraturan lainnya | 202,526,000 | 0 | 175,542,167 | 22,748,184 | 198,290,351 | 97.91 % | 4,235,649 |
| AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara | 76,436,000 | 0 | 68,680,848 | 4,760,000 | 74,440,848 | 97.39 % | 1,995,152 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 76,436,000 | 0 | 68,680,848 | 4,760,000 | 74,440,848 | 97.39 % | 1,995,152 |
| 005.0A Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN | 23,230,000 | 0 | 22,084,348 | 960,000 | 23,044,348 | 99.20 % | 185,652 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 20,770,000 | 0 | 20,044,348 | 600,000 | 20,644,348 | 99.40 % | 125,652 |
| 000018. Uang Harian | 15,220,000 | 0 | 14,910,038 | 300,000 | 15,210,038 | 99.93 % | 9,962 |
| 000019. Akomodasi | 1,970,000 | 0 | 1,953,810 | 0 | 1,953,810 | 99.18 % | 16,190 |
| 000020. Transportasi | 3,580,000 | 0 | 3,180,500 | 300,000 | 3,480,500 | 97.22 % | 99,500 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2,460,000 | 0 | 2,040,000 | 360,000 | 2,400,000 | 97.56 % | 60,000 |
| 000021. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 2,460,000 | 0 | 2,040,000 | 360,000 | 2,400,000 | 97.56 % | 60,000 |
| 005.0B Survey Lapangan dan Penilaian | 53,206,000 | 0 | 47,596,500 | 3,800,000 | 51,396,500 | 96.60 % | 1,809,500 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,000,000 | 0 | 478,500 | 0 | 478,500 | 23.92 % | 1,521,500 |
| 000022. Perjalanan dan Pengandaan | 2,000,000 | 0 | 478,500 | 0 | 478,500 | 23.92 % | 1,521,500 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 35,846,000 | 0 | 33,158,000 | 2,600,000 | 35,758,000 | 99.75 % | 88,000 |
| 000023. Uang Harian | 24,470,000 | 0 | 22,550,000 | 1,900,000 | 24,450,000 | 99.92 % | 20,000 |
| 000024. Akomodasi | 9,710,000 | 0 | 9,668,000 | 0 | 9,668,000 | 99.57 % | 42,000 |
| 000025. Transportasi | 1,666,000 | 0 | 940,000 | 700,000 | 1,640,000 | 98.44 % | 26,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 15,360,000 | 0 | 13,960,000 | 1,200,000 | 15,160,000 | 98.70 % | 200,000 |
| 000026. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 15,360,000 | 0 | 13,960,000 | 1,200,000 | 15,160,000 | 98.70 % | 200,000 |
| AAH.002 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 126,090,000 | 0 | 105,861,319 | 17,988,184 | 123,849,503 | 98.22 % | 2,240,497 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 126,090,000 | 0 | 105,861,319 | 17,988,184 | 123,849,503 | 98.22 % | 2,240,497 |
| 005.0A Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara | 126,090,000 | 0 | 105,861,319 | 17,988,184 | 123,849,503 | 98.22 % | 2,240,497 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 114,570,000 | 0 | 98,321,319 | 15,928,184 | 114,249,503 | 99.72 % | 320,497 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000014. Uang Harian | 56,480,000 | 0 | 48,420,000 | 8,060,000 | 56,480,000 | 100.00 % | 0 |
| 000015. Akomodasi | 38,090,000 | 0 | 30,818,000 | 7,040,600 | 37,858,600 | 99.39 % | 231,400 |
| 000016. Transportasi | 20,000,000 | 0 | 19,083,319 | 827,584 | 19,910,903 | 99.55 % | 89,097 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 11,520,000 | 0 | 7,540,000 | 2,060,000 | 9,600,000 | 83.33 % | 1,920,000 |
| 000017. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 11,520,000 | 0 | 7,540,000 | 2,060,000 | 9,600,000 | 83.33 % | 1,920,000 |
| ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan | 32,944,000 | 0 | 25,645,050 | 0 | 25,645,050 | 77.84 % | 7,298,950 |
| ABA.002 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset | 32,944,000 | 0 | 25,645,050 | 0 | 25,645,050 | 77.84 % | 7,298,950 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 32,944,000 | 0 | 25,645,050 | 0 | 25,645,050 | 77.84 % | 7,298,950 |
| 005.0A Implementasi Evaluasi Portofolio Aset | 32,944,000 | 0 | 25,645,050 | 0 | 25,645,050 | 77.84 % | 7,298,950 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 29,704,000 | 0 | 23,245,050 | 0 | 23,245,050 | 78.26 % | 6,458,950 |
| 000027. Uang Harian | 29,704,000 | 0 | 23,245,050 | 0 | 23,245,050 | 78.26 % | 6,458,950 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3,240,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 74.07 % | 840,000 |
| 000028. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 3,240,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 74.07 % | 840,000 |
| BAH Pelayanan Publik Lainnya | 32,505,000 | 0 | 21,430,000 | 6,990,080 | 28,420,080 | 87.43 % | 4,084,920 |
| BAH.001 Rivalah Lelang | 32,505,000 | 0 | 21,430,000 | 6,990,080 | 28,420,080 | 87.43 % | 4,084,920 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 32,505,000 | 0 | 21,430,000 | 6,990,080 | 28,420,080 | 87.43 % | 4,084,920 |
| 100.0A Rivalah Lelang | 32,505,000 | 0 | 21,430,000 | 6,990,080 | 28,420,080 | 87.43 % | 4,084,920 |
| 521211 Belanja Bahan | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 4,000,000 |
| 000029. Pengandaan dan Penjilidan | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 4,000,000 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 27,425,000 | 0 | 20,680,000 | 6,730,080 | 27,410,080 | 99.95 % | 14,920 |
| 000030. Uang Harian | 18,260,000 | 0 | 15,400,000 | 2,860,000 | 18,260,000 | 100.00 % | 0 |
| 000031. Akomodasi | 4,515,000 | 0 | 1,960,000 | 2,545,000 | 4,505,000 | 99.78 % | 10,000 |
| 000032. Transportasi | 4,650,000 | 0 | 3,320,000 | 1,325,080 | 4,645,080 | 99.89 % | 4,920 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,080,000 | 0 | 750,000 | 260,000 | 1,010,000 | 93.52 % | 70,000 |
| 000033. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 1,080,000 | 0 | 750,000 | 260,000 | 1,010,000 | 93.52 % | 70,000 |
| FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | 83,223,000 | 0 | 41,182,406 | 29,169,003 | 70,351,409 | 84.53 % | 12,871,591 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| FAE.004 Rekomendasi di Bidang Keuangan Negara | 3,709,000 | 0 | 0 | 2,460,000 | 2,460,000 | 66.33 % | 1,249,000 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 3,709,000 | 0 | 0 | 2,460,000 | 2,460,000 | 66.33 % | 1,249,000 |
| 005.0A Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN | 3,709,000 | 0 | 0 | 2,460,000 | 2,460,000 | 66.33 % | 1,249,000 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2,868,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 73.22 % | 768,000 |
| 000036. Uang Harian | 1,216,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 98.68 % | 16,000 |
| 000037. Akomodasi | 1,402,000 | 0 | 0 | 700,000 | 700,000 | 49.93 % | 702,000 |
| 000038. Transportasi | 250,000 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 80.00 % | 50,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 841,000 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 42.81 % | 481,000 |
| 000039. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 841,000 | 0 | 0 | 360,000 | 360,000 | 42.81 % | 481,000 |
| FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian | 58,452,000 | 0 | 28,901,000 | 19,119,003 | 48,020,003 | 82.15 % | 10,431,997 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 58,452,000 | 0 | 28,901,000 | 19,119,003 | 48,020,003 | 82.15 % | 10,431,997 |
| 005.0A Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian | 8,400,000 | 0 | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 | 55.71 % | 3,720,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8,400,000 | 0 | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 | 55.71 % | 3,720,000 |
| 000049. Uang Harian | 8,400,000 | 0 | 4,680,000 | 0 | 4,680,000 | 55.71 % | 3,720,000 |
| 005.0B Survei DKPB | 8,400,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 24.29 % | 6,360,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8,400,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 24.29 % | 6,360,000 |
| 000050. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 8,400,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 24.29 % | 6,360,000 |
| 005.0C Survei Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Penilaian | 41,652,000 | 0 | 22,181,000 | 19,119,003 | 41,300,003 | 99.15 % | 351,997 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 41,652,000 | 0 | 22,181,000 | 19,119,003 | 41,300,003 | 99.15 % | 351,997 |
| 000051. Uang Harian | 25,164,000 | 0 | 15,130,000 | 9,852,000 | 24,982,000 | 99.28 % | 182,000 |
| 000052. Akomodasi | 12,428,000 | 0 | 5,201,000 | 7,136,753 | 12,337,753 | 99.27 % | 90,247 |
| 000053. Transportasi | 4,060,000 | 0 | 1,850,000 | 2,130,250 | 3,980,250 | 98.04 % | 79,750 |
| FAE.007 Penggalan Potensi Lelang | 21,062,000 | 0 | 12,281,406 | 7,590,000 | 19,871,406 | 94.35 % | 1,190,594 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 21,062,000 | 0 | 12,281,406 | 7,590,000 | 19,871,406 | 94.35 % | 1,190,594 |
| 100.0A Penggalan Potensi Lelang | 21,062,000 | 0 | 12,281,406 | 7,590,000 | 19,871,406 | 94.35 % | 1,190,594 |
| 521211 Belanja Bahan | 1,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,142,000 |
| 000041. Penjilidan dan Penggandaan | 1,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,142,000 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 18,720,000 | 0 | 11,121,406 | 7,590,000 | 18,711,406 | 99.95 % | 8,594 |
| 000043. Uang Harian | 12,040,000 | 0 | 7,176,000 | 4,864,000 | 12,040,000 | 100.00 % | 0 |
| 000044. Transportasi | 1,370,000 | 0 | 1,025,406 | 336,000 | 1,361,406 | 99.37 % | 8,594 |
| 000045. Penginapan | 5,310,000 | 0 | 2,920,000 | 2,390,000 | 5,310,000 | 100.00 % | 0 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1,200,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 96.67 % | 40,000 |
| 000046. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 1,200,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 96.67 % | 40,000 |
| FAK Pengelolaan Aset BUN | 109,264,000 | 0 | 77,521,716 | 22,692,530 | 100,214,246 | 91.72 % | 9,049,754 |
| FAK.001 Aset BUN yang Dikelola | 109,264,000 | 0 | 77,521,716 | 22,692,530 | 100,214,246 | 91.72 % | 9,049,754 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 109,264,000 | 0 | 77,521,716 | 22,692,530 | 100,214,246 | 91.72 % | 9,049,754 |
| 005.0A Pengelolaan Keuangan Negara Lain-Lain | 109,264,000 | 0 | 77,521,716 | 22,692,530 | 100,214,246 | 91.72 % | 9,049,754 |
| 521211 Belanja Bahan | 4,389,000 | 0 | 4,294,200 | 0 | 4,294,200 | 97.84 % | 94,800 |
| 000055. Snack Rapat Biasa | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000056. Makan Rapat Biasa | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000057. Pencetakan dan Penggandaan | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000059. Makan Rapat Biasa | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000060. Snack Rapat Biasa | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000061. Fotocopy dan Penjilidan | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1,000 |
| 000207. Seragam Tim Pengelola Aset | 4,383,000 | 0 | 4,294,200 | 0 | 4,294,200 | 97.97 % | 88,800 |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 36,261,000 | 0 | 26,860,817 | 9,400,000 | 36,260,817 | 100.00 % | 183 |
| 000063. Uang Balas Jasa Waker | 36,000,000 | 0 | 26,600,000 | 9,400,000 | 36,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 000200. Pajak Bumi Bangunan | 261,000 | 0 | 260,817 | 0 | 260,817 | 99.93 % | 183 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 51,414,000 | 0 | 32,806,699 | 11,372,530 | 44,179,229 | 85.93 % | 7,234,771 |
| 000066. Uang Harian | 18,680,000 | 0 | 14,316,000 | 3,368,000 | 17,684,000 | 94.67 % | 996,000 |
| 000067. Akomodasi | 5,030,000 | 0 | 3,160,000 | 0 | 3,160,000 | 62.82 % | 1,870,000 |
| 000068. Transportasi | 11,000,000 | 0 | 10,130,699 | 0 | 10,130,699 | 92.10 % | 869,301 |
| 000070. Uang Harian | 7,104,000 | 0 | 5,200,000 | 1,200,000 | 6,400,000 | 90.09 % | 704,000 |
| 000071. Penginapan | 6,400,000 | 0 | 0 | 4,440,000 | 4,440,000 | 69.38 % | 1,960,000 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000072. Transportasi | 3,200,000 | 0 | 0 | 2,364,530 | 2,364,530 | 73.89 % | 835,470 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17,200,000 | 0 | 13,560,000 | 1,920,000 | 15,480,000 | 90.00 % | 1,720,000 |
| 000075. Uang Transport Dalam Kota | 10,000,000 | 0 | 7,280,000 | 1,440,000 | 8,720,000 | 87.20 % | 1,280,000 |
| 000077. Uang Transport Dalam Kota | 7,200,000 | 0 | 6,280,000 | 480,000 | 6,760,000 | 93.89 % | 440,000 |
| UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan | 30,622,000 | 0 | 17,649,356 | 2,400,000 | 20,049,356 | 65.47 % | 10,572,644 |
| UAE.201 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipkatkan (PN) | 30,622,000 | 0 | 17,649,356 | 2,400,000 | 20,049,356 | 65.47 % | 10,572,644 |
| 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 30,622,000 | 0 | 17,649,356 | 2,400,000 | 20,049,356 | 65.47 % | 10,572,644 |
| 005.0A Koordinasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) dan K/L | 30,622,000 | 0 | 17,649,356 | 2,400,000 | 20,049,356 | 65.47 % | 10,572,644 |
| 521211 Belanja Bahan | 3,400,000 | 0 | 962,500 | 2,400,000 | 3,362,500 | 98.90 % | 37,500 |
| 000078. Makan Rapat Biasa SUMATERA BARAT | 2,500,000 | 0 | 962,500 | 1,500,000 | 2,462,500 | 98.50 % | 37,500 |
| 000079. Snack Rapat Biasa SUMATERA BARAT | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 900,000 | 100.00 % | 0 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 26,742,000 | 0 | 16,566,856 | 0 | 16,566,856 | 61.95 % | 10,175,144 |
| 000080. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Barat) | 11,197,000 | 0 | 8,964,000 | 0 | 8,964,000 | 80.06 % | 2,233,000 |
| 000081. Transportasi | 3,345,000 | 0 | 520,000 | 0 | 520,000 | 15.55 % | 2,825,000 |
| 000082. Penginapan | 12,200,000 | 0 | 7,082,856 | 0 | 7,082,856 | 58.06 % | 5,117,144 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 480,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 25.00 % | 360,000 |
| 000083. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Barat) | 480,000 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 25.00 % | 360,000 |
| WAProgram Dukungan Manajemen | 1,941,687,000 | 0 | 1,727,116,570 | 172,669,518 | 1,899,786,088 | 97.84 % | 41,900,912 |
| WA.4700 Legislasi dan Litigasi | 97,864,000 | 0 | 95,703,209 | 2,103,000 | 97,806,209 | 99.94 % | 57,791 |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 97,864,000 | 0 | 95,703,209 | 2,103,000 | 97,806,209 | 99.94 % | 57,791 |
| EBA.969 Layanan Bantuan Hukum | 97,864,000 | 0 | 95,703,209 | 2,103,000 | 97,806,209 | 99.94 % | 57,791 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 97,864,000 | 0 | 95,703,209 | 2,103,000 | 97,806,209 | 99.94 % | 57,791 |
| 100.0A Layanan Bantuan Hukum | 97,864,000 | 0 | 95,703,209 | 2,103,000 | 97,806,209 | 99.94 % | 57,791 |
| 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 6,000,000 | 0 | 5,882,500 | 93,000 | 5,975,500 | 99.59 % | 24,500 |
| 000084. Biaya Penanganan Perkara | 500,000 | 0 | 382,500 | 93,000 | 475,500 | 95.10 % | 24,500 |
| 000085. Materai | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 100.00 % | 0 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 64,854,000 | 0 | 64,220,709 | 600,000 | 64,820,709 | 99.95 % | 33,291 |
| 000086. Akomodasi | 13,726,000 | 0 | 13,719,054 | 0 | 13,719,054 | 99.95 % | 6,946 |
| 000087. Transportasi | 12,640,000 | 0 | 12,639,655 | 0 | 12,639,655 | 100.00 % | 345 |
| 000088. Uang Harian | 38,488,000 | 0 | 37,862,000 | 600,000 | 38,462,000 | 99.93 % | 26,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 27,010,000 | 0 | 25,600,000 | 1,410,000 | 27,010,000 | 100.00 % | 0 |
| 000089. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 27,010,000 | 0 | 25,600,000 | 1,410,000 | 27,010,000 | 100.00 % | 0 |
| WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | 1,826,273,000 | 0 | 1,615,854,271 | 170,366,518 | 1,786,220,789 | 97.81 % | 40,052,211 |
| EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1,742,111,000 | 0 | 1,535,082,848 | 170,366,518 | 1,705,449,366 | 97.90 % | 36,661,634 |
| EBA.002 Kerumahtanggaan | 59,608,000 | 0 | 49,811,744 | 6,162,500 | 55,974,244 | 93.90 % | 3,633,756 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 59,608,000 | 0 | 49,811,744 | 6,162,500 | 55,974,244 | 93.90 % | 3,633,756 |
| 100.0A Pelayanan Umum | 59,608,000 | 0 | 49,811,744 | 6,162,500 | 55,974,244 | 93.90 % | 3,633,756 |
| 521211 Belanja Bahan | 4,835,000 | 0 | 2,805,500 | 1,847,000 | 4,652,500 | 96.23 % | 182,500 |
| 000154. Cetak/Penggandaan | 1,810,000 | 0 | 610,000 | 1,120,000 | 1,730,000 | 95.58 % | 80,000 |
| 000155. Makan Siang Rapat | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | 29,000 | 100.00 % | 0 |
| 000156. Snack Rapat | 2,996,000 | 0 | 2,195,500 | 698,000 | 2,893,500 | 96.58 % | 102,500 |
| 522151 Belanja Jasa Profesi | 1,800,000 | 0 | 1,526,316 | 0 | 1,526,316 | 84.80 % | 273,684 |
| 000157. Honorarium Instruktur Senam | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 200,000 |
| 000158. Honorarium Rohaniawan | 1,600,000 | 0 | 1,526,316 | 0 | 1,526,316 | 95.39 % | 73,684 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 49,133,000 | 0 | 44,879,928 | 3,955,500 | 48,835,428 | 99.39 % | 297,572 |
| 000159. Akomodasi | 19,845,000 | 0 | 19,830,985 | 0 | 19,830,985 | 99.93 % | 14,015 |
| 000160. Transportasi | 14,168,000 | 0 | 11,710,943 | 2,457,000 | 14,167,943 | 100.00 % | 57 |
| 000161. Uang Harian | 15,120,000 | 0 | 13,338,000 | 1,498,500 | 14,836,500 | 98.12 % | 283,500 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3,840,000 | 0 | 600,000 | 360,000 | 960,000 | 25.00 % | 2,880,000 |
| 000162. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 3,840,000 | 0 | 600,000 | 360,000 | 960,000 | 25.00 % | 2,880,000 |
| EBA.994 Layanan Perkantoran | 1,682,503,000 | 0 | 1,485,271,104 | 164,204,018 | 1,649,475,122 | 98.04 % | 33,027,878 |
| 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1,682,503,000 | 0 | 1,485,271,104 | 164,204,018 | 1,649,475,122 | 98.04 % | 33,027,878 |
| 002.0A Operasionalisasi Kantor | 1,045,414,000 | 0 | 904,436,012 | 117,333,623 | 1,021,769,635 | 97.74 % | 23,644,365 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 521111 Belanja Keperluan Perkantoran | 805,160,000 | 0 | 721,881,770 | 72,543,786 | 794,425,556 | 98.67 % | 10,734,444 |
| 000090. Honorarium Cleaning Service | 147,420,000 | 0 | 122,849,440 | 24,569,888 | 147,419,328 | 100.00 % | 672 |
| 000091. Pajak Kendaraan Roda 2 | 2,000,000 | 0 | 1,082,100 | 0 | 1,082,100 | 54.10 % | 917,900 |
| 000092. Pakaian Dinas Pegawai | 26,884,000 | 0 | 25,624,560 | 0 | 25,624,560 | 95.32 % | 1,259,440 |
| 000093. Pakaian Dinas Satpam dan Pengemudi | 8,195,000 | 0 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 | 76.88 % | 1,895,000 |
| 000094. Pakaian Dinas Pramubakti | 4,928,000 | 0 | 2,940,000 | 0 | 2,940,000 | 59.66 % | 1,988,000 |
| 000095. Honorarium Satpam dan Pengemudi | 216,905,000 | 0 | 200,220,000 | 16,685,000 | 216,905,000 | 100.00 % | 0 |
| 000096. Honorarium Pramubhakti | 276,003,000 | 0 | 254,772,000 | 21,231,000 | 276,003,000 | 100.00 % | 0 |
| 000097. Keperluan Sehari-Hari Perkantoran | 70,020,000 | 0 | 65,051,770 | 4,939,786 | 69,991,556 | 99.96 % | 28,444 |
| 000098. Jamuan Tamu | 19,405,000 | 0 | 10,474,450 | 5,118,112 | 15,592,562 | 80.35 % | 3,812,438 |
| 000099. Pajak Kendaraan Roda 4 | 13,500,000 | 0 | 12,721,100 | 0 | 12,721,100 | 94.23 % | 778,900 |
| 000208. Keperluan In House Training | 19,900,000 | 0 | 19,846,350 | 0 | 19,846,350 | 99.73 % | 53,650 |
| 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 8,856,000 | 0 | 5,253,700 | 2,397,000 | 7,650,700 | 86.39 % | 1,205,300 |
| 000100. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 8,856,000 | 0 | 5,253,700 | 2,397,000 | 7,650,700 | 86.39 % | 1,205,300 |
| 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 8,760,000 | 0 | 2,191,000 | 0 | 2,191,000 | 25.01 % | 6,569,000 |
| 000101. Biaya Pengiriman Surat | 8,760,000 | 0 | 2,191,000 | 0 | 2,191,000 | 25.01 % | 6,569,000 |
| 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 112,680,000 | 0 | 93,900,000 | 18,780,000 | 112,680,000 | 100.00 % | 0 |
| 000103. Honorarium Koordinator | 2,400,000 | 0 | 2,000,000 | 400,000 | 2,400,000 | 100.00 % | 0 |
| 000104. Honorarium Ketua/Wakil Ketua | 1,800,000 | 0 | 1,500,000 | 300,000 | 1,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 000105. Honorarium Anggota | 5,400,000 | 0 | 4,500,000 | 900,000 | 5,400,000 | 100.00 % | 0 |
| 000107. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNPB | 7,800,000 | 0 | 6,500,000 | 1,300,000 | 7,800,000 | 100.00 % | 0 |
| 000108. Honorarium Bendahara Pengelola PNPB | 6,360,000 | 0 | 5,300,000 | 1,060,000 | 6,360,000 | 100.00 % | 0 |
| 000109. Honorarium Anggota Pengelola PNPB | 19,200,000 | 0 | 16,000,000 | 3,200,000 | 19,200,000 | 100.00 % | 0 |
| 000111. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang | 2,160,000 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 2,160,000 | 100.00 % | 0 |
| 000113. Honorarium Staf PPK | 8,400,000 | 0 | 7,000,000 | 1,400,000 | 8,400,000 | 100.00 % | 0 |
| 000114. Honorarium Pejabat Pengadaan | 8,160,000 | 0 | 6,800,000 | 1,360,000 | 8,160,000 | 100.00 % | 0 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000115. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | 16,440,000 | 0 | 13,700,000 | 2,740,000 | 16,440,000 | 100.00 % | 0 |
| 000116. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | 15,960,000 | 0 | 13,300,000 | 2,660,000 | 15,960,000 | 100.00 % | 0 |
| 000117. Honorarium Penguji Tagihan Penandatanganan SPM | 6,360,000 | 0 | 5,300,000 | 1,060,000 | 6,360,000 | 100.00 % | 0 |
| 000118. Honorarium Bendahara Pengeluaran | 5,640,000 | 0 | 4,700,000 | 940,000 | 5,640,000 | 100.00 % | 0 |
| 000119. Honorarium Staf Pengelola | 4,200,000 | 0 | 3,500,000 | 700,000 | 4,200,000 | 100.00 % | 0 |
| 000121. Honorarium Penanggung Jawab | 2,400,000 | 0 | 2,000,000 | 400,000 | 2,400,000 | 100.00 % | 0 |
| 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya | 50,000,000 | 0 | 49,939,840 | 0 | 49,939,840 | 99.88 % | 60,160 |
| 000201. Medical Checkup | 50,000,000 | 0 | 49,939,840 | 0 | 49,939,840 | 99.88 % | 60,160 |
| 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 47,958,000 | 0 | 25,911,100 | 18,624,600 | 44,535,700 | 92.86 % | 3,422,300 |
| 000122. Materai | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100.00 % | 0 |
| 000123. Persediaan Barang Konsumsi | 8,820,000 | 0 | 5,827,500 | 372,000 | 6,199,500 | 70.29 % | 2,620,500 |
| 000124. ATK dan Persediaan Komputer | 37,138,000 | 0 | 20,083,600 | 16,252,600 | 36,336,200 | 97.84 % | 801,800 |
| 522113 Belanja Langganan Air | 12,000,000 | 0 | 5,358,602 | 4,988,237 | 10,346,839 | 86.22 % | 1,653,161 |
| 000125. Belanja Langganan Air | 12,000,000 | 0 | 5,358,602 | 4,988,237 | 10,346,839 | 86.22 % | 1,653,161 |
| 002.0B Pemeliharaan Perawatan Mesin | 285,149,000 | 0 | 250,584,567 | 26,681,782 | 277,266,349 | 97.24 % | 7,882,651 |
| 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 285,149,000 | 0 | 250,584,567 | 26,681,782 | 277,266,349 | 97.24 % | 7,882,651 |
| 000127. Pemeliharaan Sound System | 4,864,000 | 0 | 2,550,000 | 1,500,000 | 4,050,000 | 83.26 % | 814,000 |
| 000128. Pemeliharaan Inventaris Perkantoran | 2,000,000 | 0 | 920,000 | 1,035,576 | 1,955,576 | 97.78 % | 44,424 |
| 000129. Pemeliharaan AC Split | 25,620,000 | 0 | 19,225,000 | 5,576,776 | 24,801,776 | 96.81 % | 818,224 |
| 000130. Pemeliharaan Mesin Fotocopy | 10,889,000 | 0 | 9,639,000 | 0 | 9,639,000 | 88.52 % | 1,250,000 |
| 000131. Pemeliharaan Genset 750 Kva | 23,566,000 | 0 | 21,283,500 | 1,926,000 | 23,209,500 | 98.49 % | 356,500 |
| 000132. Pemeliharaan CCTV | 16,200,000 | 0 | 15,736,940 | 0 | 15,736,940 | 97.14 % | 463,060 |
| 000133. Pemeliharaan Jaringan | 10,000,000 | 0 | 3,750,000 | 6,156,000 | 9,906,000 | 99.06 % | 94,000 |
| 000135. Pemeliharaan Roda 4 Jabatan Pengadaan Baru | 21,475,000 | 0 | 19,823,414 | 1,609,955 | 21,433,369 | 99.81 % | 41,631 |
| 000138. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 135,120,000 | 0 | 129,565,031 | 5,473,257 | 135,038,288 | 99.94 % | 81,712 |
| 000139. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 10,200,000 | 0 | 9,151,187 | 791,518 | 9,942,705 | 97.48 % | 257,295 |
| 000141. Pemeliharaan Lemari Es | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 1,350,000 | 45.00 % | 1,650,000 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 000143. Pemeliharaan Sice | 15,215,000 | 0 | 15,211,440 | 0 | 15,211,440 | 99.98 % | 3,560 |
| 000144. Pemeliharaan TV | 2,500,000 | 0 | 235,000 | 1,262,700 | 1,497,700 | 59.91 % | 1,002,300 |
| 000146. Pemeliharaan Kamera | 2,000,000 | 0 | 1,694,055 | 0 | 1,694,055 | 84.70 % | 305,945 |
| 000209. Pemeliharaan Telephone (PABX) | 2,500,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 72.00 % | 700,000 |
| 002.0C Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 281,830,000 | 0 | 271,277,105 | 10,396,971 | 281,674,076 | 99.94 % | 155,924 |
| 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 281,830,000 | 0 | 271,277,105 | 10,396,971 | 281,674,076 | 99.94 % | 155,924 |
| 000147. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Barat) | 247,672,000 | 0 | 243,319,550 | 4,274,267 | 247,593,817 | 99.97 % | 78,183 |
| 000148. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Sumatera Barat) | 24,288,000 | 0 | 20,496,555 | 3,744,704 | 24,241,259 | 99.81 % | 46,741 |
| 000149. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sumatera Barat) | 9,870,000 | 0 | 7,461,000 | 2,378,000 | 9,839,000 | 99.69 % | 31,000 |
| 002.TJ Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS) | 70,110,000 | 0 | 58,973,420 | 9,791,642 | 68,765,062 | 98.08 % | 1,344,938 |
| 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 70,110,000 | 0 | 58,973,420 | 9,791,642 | 68,765,062 | 98.08 % | 1,344,938 |
| 000151. Pemeliharaan UPS | 13,080,000 | 0 | 13,000,920 | 0 | 13,000,920 | 99.40 % | 79,080 |
| 000152. Pemeliharaan PC/Notebook | 37,230,000 | 0 | 30,897,500 | 5,891,642 | 36,789,142 | 98.82 % | 440,858 |
| 000153. Pemeliharaan Printer | 19,800,000 | 0 | 15,075,000 | 3,900,000 | 18,975,000 | 95.83 % | 825,000 |
| EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 84,162,000 | 0 | 80,771,423 | 0 | 80,771,423 | 95.97 % | 3,390,577 |
| EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran | 56,162,000 | 0 | 54,671,423 | 0 | 54,671,423 | 97.35 % | 1,490,577 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 56,162,000 | 0 | 54,671,423 | 0 | 54,671,423 | 97.35 % | 1,490,577 |
| 100.0A Peralatan Fasilitas Perkantoran | 56,162,000 | 0 | 54,671,423 | 0 | 54,671,423 | 97.35 % | 1,490,577 |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56,162,000 | 0 | 54,671,423 | 0 | 54,671,423 | 97.35 % | 1,490,577 |
| 000166. Camera Digital | 31,242,000 | 0 | 29,933,000 | 0 | 29,933,000 | 95.81 % | 1,309,000 |
| 000203. Mic Wireless | 4,600,000 | 0 | 4,444,551 | 0 | 4,444,551 | 96.62 % | 155,449 |
| 000204. Soundcard | 4,970,000 | 0 | 4,969,644 | 0 | 4,969,644 | 99.99 % | 356 |
| 000205. Tripod | 1,450,000 | 0 | 1,425,000 | 0 | 1,425,000 | 98.28 % | 25,000 |
| 000206. Camera conference | 13,900,000 | 0 | 13,899,228 | 0 | 13,899,228 | 99.99 % | 772 |
| EBB.003 Kendaraan Bermotor | 28,000,000 | 0 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 93.21 % | 1,900,000 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 28,000,000 | 0 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 93.21 % | 1,900,000 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|--|-------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 100.KA Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 | 28,000,000 | 0 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 93.21 % | 1,900,000 |
| 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 28,000,000 | 0 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 93.21 % | 1,900,000 |
| 000172. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 | 28,000,000 | 0 | 26,100,000 | 0 | 26,100,000 | 93.21 % | 1,900,000 |
| WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | 13,844,000 | 0 | 12,908,090 | 200,000 | 13,108,090 | 94.68 % | 735,910 |
| BMB Komunikasi Publik | 13,844,000 | 0 | 12,908,090 | 200,000 | 13,108,090 | 94.68 % | 735,910 |
| BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik | 4,539,000 | 0 | 4,248,085 | 0 | 4,248,085 | 93.59 % | 290,915 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 4,539,000 | 0 | 4,248,085 | 0 | 4,248,085 | 93.59 % | 290,915 |
| 100.0A Pelaksanaan Hari Oeang | 2,025,000 | 0 | 1,769,300 | 0 | 1,769,300 | 87.37 % | 255,700 |
| 521211 Belanja Bahan | 2,025,000 | 0 | 1,769,300 | 0 | 1,769,300 | 87.37 % | 255,700 |
| 000176. Makan Siang | 2,025,000 | 0 | 1,769,300 | 0 | 1,769,300 | 87.37 % | 255,700 |
| 100.0B Pelaksanaan DJKN Goes to Campus | 1,000,000 | 0 | 987,800 | 0 | 987,800 | 98.78 % | 12,200 |
| 521211 Belanja Bahan | 1,000,000 | 0 | 987,800 | 0 | 987,800 | 98.78 % | 12,200 |
| 000180. Goodie Bag DJKN Goes To Campus | 1,000,000 | 0 | 987,800 | 0 | 987,800 | 98.78 % | 12,200 |
| 100.0C Public Campaign | 1,514,000 | 0 | 1,490,985 | 0 | 1,490,985 | 98.48 % | 23,015 |
| 521211 Belanja Bahan | 1,514,000 | 0 | 1,490,985 | 0 | 1,490,985 | 98.48 % | 23,015 |
| 000183. Makan Siang | 1,514,000 | 0 | 1,490,985 | 0 | 1,490,985 | 98.48 % | 23,015 |
| BMB.002 Kehumasan | 6,220,000 | 0 | 5,872,500 | 200,000 | 6,072,500 | 97.63 % | 147,500 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 6,220,000 | 0 | 5,872,500 | 200,000 | 6,072,500 | 97.63 % | 147,500 |
| 100.0A Peliputan Berita Mengenai DJKN | 6,220,000 | 0 | 5,872,500 | 200,000 | 6,072,500 | 97.63 % | 147,500 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2,900,000 | 0 | 2,772,500 | 0 | 2,772,500 | 95.60 % | 127,500 |
| 000191. Akomodasi | 1,226,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 94.62 % | 66,000 |
| 000192. Transportasi | 50,000 | 0 | 24,500 | 0 | 24,500 | 49.00 % | 25,500 |
| 000193. Uang Harian | 1,624,000 | 0 | 1,588,000 | 0 | 1,588,000 | 97.78 % | 36,000 |
| 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 3,320,000 | 0 | 3,100,000 | 200,000 | 3,300,000 | 99.40 % | 20,000 |
| 000194. Uang Harian Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam | 3,320,000 | 0 | 3,100,000 | 200,000 | 3,300,000 | 99.40 % | 20,000 |
| BMB.003 Pameran/Eksibisi | 3,085,000 | 0 | 2,787,505 | 0 | 2,787,505 | 90.36 % | 297,495 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 3,085,000 | 0 | 2,787,505 | 0 | 2,787,505 | 90.36 % | 297,495 |

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

| Uraian | Pagu Revisi | Lock Pagu | Realisasi TA 2025 | | | | SISA ANGGARAN |
|---|------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Periode Lalu | Periode Ini | s.d. Periode | % | |
| 100.0A Pelaksanaan Pameran | 3,085,000 | 0 | 2,787,505 | 0 | 2,787,505 | 90.36 % | 297,495 |
| 521211 Belanja Bahan | 3,085,000 | 0 | 2,787,505 | 0 | 2,787,505 | 90.36 % | 297,495 |
| 000185. Snack | 510,000 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 | 56.47 % | 222,000 |
| 000186. Makan Siang | 1,030,000 | 0 | 1,029,505 | 0 | 1,029,505 | 99.95 % | 495 |
| 000188. Spanduk | 1,545,000 | 0 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 | 95.15 % | 75,000 |
| WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | 3,706,000 | 0 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 | 71.53 % | 1,055,000 |
| EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal | 3,706,000 | 0 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 | 71.53 % | 1,055,000 |
| EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal | 3,706,000 | 0 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 | 71.53 % | 1,055,000 |
| 100 Tidak Ada Komponen | 3,706,000 | 0 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 | 71.53 % | 1,055,000 |
| 100.0A Implementasi Pengendalian Kepatuhan Internal | 3,706,000 | 0 | 2,651,000 | 0 | 2,651,000 | 71.53 % | 1,055,000 |
| 521211 Belanja Bahan | 1,490,000 | 0 | 435,000 | 0 | 435,000 | 29.19 % | 1,055,000 |
| 000195. Cetak/Penggandaan | 1,490,000 | 0 | 435,000 | 0 | 435,000 | 29.19 % | 1,055,000 |
| 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 2,216,000 | 0 | 2,216,000 | 0 | 2,216,000 | 100.00 % | 0 |
| 000196. Uang Harian | 2,216,000 | 0 | 2,216,000 | 0 | 2,216,000 | 100.00 % | 0 |